

DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel Jurnal

- Daniel Aditya Utama Dan Rediana Setiyani, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, (2014).
- Delbert C. Miller and Neil J. Salkind, *Handbook of Research Design and Social Measurement* (Sage, 2002).
- Harvorsen dalam Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsana Nur, “Implementasi Good Governance Di Indonesia”, *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, Vol.11, No.1, Juni 2019.
- Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya, Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. 9, No. 3, (2014).
- Nuriyanto, “Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State”?”, Vol. 11, No. 3 (2014).
- Putra, Muslimin B, “Mengenal Pelayanan Publik”, *Ombudsman Republik Indonesia*, 29 November 2020.
- Ratminto dan Winarsih dalam Daniel Aditya Utama Dan Rediana Setiyani, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan*, Vol. 9, No. 2, (2014).
- Santosa, Ardika , “Peraturan Terkait E-Government di Indonesia”, *Seven Media Technology*, 26 Juli 2019.
- Sulfiani, Andi Ni'mah, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelayanan BPJS Kesehatan Di Kota Palopo”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. XVII(1), (2021).
- Warjiyati, Sri, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Indonesia”, *Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, (2018.)
- Widanti, Ni Putu Tirka, “Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur”, *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 1, (2022)
- Yulianto, “Efektivitas Aplikasi SP4N-LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional) Dalam Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tangerang Provinsi Banten”.

B. Buku

- Akhmad Sukardi, *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Laksbang Pressindo*, Yogyakarta.
- Bambang Irawan dan Muhammad Nizar Hidayat, 2021, *E-government : konsep, esensi dan studi kasus*, Mulawarman University Press, Samarinda.
- Buku Panduan SP4N-LAPOR.

- Delbert C. Miller and Neil J. Salkind, 2002. *Handbook of Research Design and Social Measurement*, Sage.
- Levine dalam Syarifah Muslimah, 2016, *Responsibilitas Pelayanan Publik Pada Rsud Salewangan Kabupaten Maros*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Sulawesi Selatan.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 35. dan F. Sugeng Istanto, 2009, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J, 1989, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.
- Philipus, M. Hadjon, *et al.*, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesembilan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sipayung, P.J.J, 1989, *Pejabat Sebagai Calon Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, CV. Sri Rahayu, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia Press (UI-Press), Jakarta. dalam Zainuddin Ali, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Internet dan Wawancara

- Andreas W. Finaka, “E-Governments Bisa Meminimalisir Korupsi”, indonesia baik.id, <https://indonesiabaik.id/>, diakses pada 29 April 2024.
- Ardika Santosa, “Peraturan Terkait E-Government di Indonesia”, *Seven Media Technology*, 26 Juli 2019.
- Dinas Kebudayaan (kudha kabudayaan) Daerah Istimewa Yogyakarta, “Penjelasan UU Keistimewaan DIY”, 08 September 2012.
- Dinas Kebudayaan (kudha kabudayaan) Daerah Istimewa Yogyakarta, “Kajian Hukum Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta”, 14 Juni 2023.
- Dinas Kominfosantik Kab. Gumas, “SP4N-LAPOR! Dibentuk Untuk Realisasikan Kebijakan No Wrong Door Policy”, *mmc.kalteng.go.id*, 26 Agustus 2021.
- Diskominfo, “Pengertian, keuntungan & kerugian E-government”, *Diskominfo Kabupaten Bandung*, 28 Desember 2017.
- Humas DIY, “Dukung Pengaduan Pelayanan Publik, Pemda DIY Kolaborasi Sosialisasikan SP4N-LAPOR!”, <https://jogjaprovo.go.id/berita/dukung-pengaduan-pelayanan-publik-pemda-diy-kolaborasi-sosialisasikan-sp4n-lapor>, diakses 15 Juli 2024.
- KemenPANRB, “Pemantauan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023 Segera Dimulai”, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 24 Februari 2023.
- Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Diy Hari Edi Tri Wahyu Nugroho Dalam Haris Firdaus, “Tingkatkan Layanan Publik, 679 Instansi Terhubung Dengan Sistem Lapor!”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/15/tingkatkanLayanan-Publik-679-Instansi-Terhubung-Dengan-Sistem-Lapor>, diakses 5 November 2023.

LAPOR!, “Data Laporan Wilayah”,
<https://www.lapor.go.id/statistik/wilayahlaporan>, diakses 5 November 2023.

Mahmudi dalam Muslimin B Putra, “Mengenal Pelayanan Publik”, *Ombudsman Republik Indonesia*, 29 November 2020.

Sri Warjiyati, “Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Di Indonesia”, *Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, 2018.

Ibu Yusticia Eka Noor Ida selaku narasumber dari Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta pada 12 Februari 2024.

Bapak Nugroho Jannin Warenpan, S.Kom., M.Eng. selaku narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta pada 13 Februari 2024.

Ibu Nita Anggi Pangestuti selaku narasumber dari Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta pada 13 Februari 2024.

Bapak Aris Sujatmiko, SET, MIP. selaku narasumber dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada 15 Februari 2024.

Narasumber dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta pada 19 Februari 2024.

Bapak Gunawan Sri Subekti, S.T., MPA. selaku narasumber Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta pada 21 Februari 2024.

Bapak Ari Susanto selaku narasumber Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta pada 21 Februari 2024.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 DIY Pembentukan Peraturan tentang Pembentukan DIY yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967.

- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang ROAD MAP Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 131.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Pengaduan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 499.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*.

E. Skripsi dan Disertasi

- Boellan, Shandra Yuvitha, 2022, *Efektivitas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Sp4n Lapor!)* Dalam Rangka Pemantauan Pelayanan Publik Di Kota Kupang, Skripsi, Universitas Nusa Cendana, Kupang.
- Hafidz, Shobaqoel, 2018, *Analisis Layanan Pemerintah Bojonegoro Melalui Sistem Integrasi Aplikasi Pengaduan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (Siap-Lapor!)* (Penyelesaian Laporan Masyarakat di Bidang Pertanian Tahun 2016), Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Vionika, Nurul, 2022, *Perencanaan Komunikasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Mensosialisasikan Aplikasi*

Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!), Skripsi,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.
Widiyarta, Agus, 2012, Pelayanan Kesehatan Dari Perspektif Participatory
Governance (Studi Kasus Tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Pelayanan Dasar Kesehatan Di Kota Surabaya), Disertasi Program Doktor
Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,
Malang.